

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Struktur kepemilikan merupakan salah satu topik yang menarik untuk diperbincangkan, hal ini dikarenakan topik ini membahas mengenai konflik keagenan. Konflik keagenan dibagi menjadi dua tipe yaitu konflik tipe 1 yang merupakan konflik yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Konflik ini terjadi karena adanya asimetris informasi yang dimiliki manajer dengan pemegang saham, sedangkan konflik tipe 2 merupakan konflik antara pemegang saham pengendali (mayoritas) dengan pemegang saham non-pengendali (minoritas). Konflik ini biasanya terjadi dikarenakan adanya ketidakselarasan tujuan atau adanya perbedaan kepentingan

Siregar, (2011) berpendapat fenomena perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali (mayoritas) yang sama lazim ditemukan di Indonesia. Fenomena ini terjadi karena adanya kepemilikan piramida yang umum ditemukan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan menggunakan konsep kepemilikan imediat atau kepemilikan langsung yang selama ini digunakan, gambaran rangkaian kepemilikan secara komprehensif tidak dapat diketahui. Untuk itu dibutuhkan konsep baru, yaitu kepemilikan ultimat agar rangkaian kepemilikan, konsentrasi kepemilikan, dan pemegang saham pengendali yang diidentifikasi lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya (Siregar, 2011).

Konsep kepemilikan ultimat dapat mengidentifikasi struktur kepemilikan hingga rantai kepemilikan paling akhir (Cahyani, 2014). Oleh karena itu, konsentrasi dari kepemilikan pemegang saham dapat diidentifikasi dengan lebih menyeluruh hingga rantai kepemilikan yang paling akhir.

La Porta et al. (1999) berpendapat perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang cenderung terkonsentrasi. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki karakteristik yaitu pengambilan keputusan berdasarkan atas keputusan dari pemegang saham pengendali (mayoritas). Salah satu keputusan yang diambil adalah keputusan mengenai pembagian dividen serta besar kecilnya dividen yang akan dibagikan. Dividen merupakan salah satu unsur yang dapat digunakan untuk menggambarkan masalah keagenan (Siregar, 2011). Faccio et al. (2001) juga berfokus pada keputusan pemegang saham pengendali terhadap dividen, dividen merupakan keputusan yang penting karena pemegang saham pengendali (mayoritas) harus membagikan sumber daya yang dimiliki kepada pemegang saham non-pengendali (minoritas) daripada menahan sumber daya untuk kepentingan sendiri. Dividen merupakan salah satu cara untuk menekan konflik keagenan tipe 2, semakin besar dividen yang dibagikan maka semakin kecil konflik keagenan tipe 2, karena pemegang saham pengendali tidak mementingkan kepentingan sendiri dan pemegang saham non-pengendali (minoritas) mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu dividen. Hal ini sesuai dengan teori *bird in the hand*, yang mengatakan pemegang saham non-pengendali lebih menyukai dividen dibandingkan dengan *capital gain*, karena pemegang

saham non-pengendali lebih yakin terhadap penerimaan dividen daripada kenaikan nilai modal (*capital gain*) yang akan dihasilkan.

Carney & Child, (2013) berpendapat lebih dari separuh perusahaan di Indonesia dimiliki oleh perusahaan keluarga, sehingga perusahaan keluarga masih memiliki peranan penting di Indonesia. Hal ini juga selaras dengan hasil survey yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Coopers* (2014) yaitu perusahaan keluarga memegang 95% bisnis di Indonesia. Selain perusahaan keluarga Setiawan et al. (2016) mengatakan struktur kepemilikan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kepemilikan yang dikendalikan keluarga, investor asing dan pemerintah. Perusahaan yang dikendalikan pemerintah memiliki kecenderungan untuk membagikan laba perusahaan melalui pembagian dividen. Pembagian dividen yang dilakukan bertujuan untuk menambah pemasukan bagi negara yang dapat dialokasikan sebagai sumber daya dalam pembangunan di Indonesia. Semakin besar laba yang didapat perusahaan yang dikendalikan pemerintah maka semakin besar dividen yang akan diterima pemerintah, maka semakin banyak juga sumber daya yang dimiliki negara untuk membangun negara. Peningkatan infrastruktur di Indonesia membuat investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya. Selain itu Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) telah menaikkan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi BBB dengan *outlook* stabil, tentu dengan kenaikan *grade* ini akan membuat investor asing semakin percaya dengan Indonesia sehingga mereka semakin berani menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, struktur kepemilikan pengendali di

Indonesia dapat dikelompokkan menjadi perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan pemerintah, dan struktur kepemilikan asing.

Penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan keluarga, pemerintah, dan investor asing terhadap kebijakan dividen sudah pernah dilakukan sebelumnya di negara-negara lain dan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Bradford *et al.* (2013), menunjukkan hasil, struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan Setiawan *et al.* (2016) juga menemukan yang sama bahwa struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan struktur kepemilikan pemerintah dan investor asing berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Basil (2016) menemukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan Lucyanda, J & Lilyana (2012) juga menemukan bahwa kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *dividend payout ratio* perusahaan.

Di Indonesia tidak ada peraturan yang menetapkan bahwa dividen harus dibagikan, maka dari itu banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Setiap perusahaan tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam membuat kebijakan dividen. Maka dari itu di Indonesia banyak mengalami konflik keagenan tipe 2. Menurut Siregar, (2011) konflik antara pemegang saham pengendali (mayoritas) dengan pemegang saham non-pengendali (minoritas) merupakan konflik

keagenan yang secara kontekstual mungkin merupakan konflik utama di negara berkembang dengan perusahaan yang memiliki karakteristik kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan tidak langsung, dan pemegang saham yang terlibat dalam manajemen. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan tata kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham non-pengendali (minoritas). Secara terminologi tata kelola perusahaan dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi dewan komisaris pengurus (pengelola perusahaan) dan para pemilik atau pemegang saham (FCGI, 2001). Salah satu cara penerapan tata kelola perusahaan adalah dengan melihat *board size* serta menempatkan *board independence*. Dengan *board size* yang besar akan memberikan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan dalam penggunaan sumber daya perusahaan, sedangkan *board independence* akan mengawasi dewan direksi atau manajer dan melindungi kepentingan pemegang saham non-pengendali (minoritas).

Penelitian mengenai pengaruh *board size* dan *board independence* terhadap kebijakan dividen telah dilakukan sebelumnya. Widiyanti *et al.* (2014), menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hasil serupa ditemukan oleh Ginting (2015) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap dividen yang dibagikan. Julianti (2020) juga menemukan bahwa *board size* berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Namun, berbeda menurut Triwulan, H & Wahidahwati (2012) yang mengatakan bahwa *board size* dan *board independence* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal serupa juga didapat

Abdelsalam *et al.* (2008), yang mengatakan tidak adanya hubungan signifikan antara pengaruh *board size* dan *board independence* kebijakan dividen.

Berdasarkan uraian fenomena dan ketidakkonsistenan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan komposisi dewan terhadap pembayaran dividen.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap kebijakan dividen ?
2. Apakah struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap kebijakan dividen ?
3. Apakah struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap kebijakan dividen ?
4. Apakah *board size* berpengaruh terhadap kebijakan dividen ?
5. Apakah *board independence* berpengaruh terhadap kebijakan dividen ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap kebijakan dividen.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai kepemilikan asing berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai *board size* berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai *board independence* berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

#### **1.4 Kontribusi/ Manfaat penelitian**

##### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi akademisi sebagai bukti empiris sekaligus menambah literatur akuntansi mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan komposisi dewan terhadap kebijakan dividen.

##### **1.4.2 Kontribusi Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi investor atau calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

## Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori terkait yang memperkuat topik penelitian, berbagai penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

## Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metodologi yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

## Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil pengolahan data secara keseluruhan atas penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang dijelaskan secara rinci sehingga tercapai hasil analisis dari penelitian.

## Bab 5: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.